

BAB II

PERKEMBANGAN KONFLIK AFGHANISTAN DAN DINAMIKA HUBUNGAN DENGAN CHINA

Dalam Bab II, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan konflik Afghanistan dan dinamika hubungan dengan China sehingga dapat mengetahui posisi sekaligus respons China dalam menentukan politik luar negerinya terhadap Afghanistan.

2.1 Konflik Afghanistan

Konflik Afghanistan dapat dikatakan telah dimulai sejak persaingan politik dan militer antara Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia di Asia Tengah pada abad ke-19 yang biasa disebut dengan “The Great Game”. Afghanistan menjadi wilayah ekspansi sekaligus menjadi tempat persaingan antara dua kekaisaran tersebut. Hal tersebut juga menjadi awal kondisi politik dan pemerintahan di Afghanistan yang selalu berada di bawah pengaruh negara lain. Konflik di Afghanistan masih berlanjut setelah periode “The Great Game” berakhir, termasuk selama perang saudara, invasi Uni Soviet pada tahun 1979, kemunculan Taliban, dan invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan setelah tragedi 9/11 dan berakhir setelah 20 tahun.

Taliban berhasil menguasai dan membuat pemerintahan baru di Afghanistan pada Agustus 2021 setelah menggulingkan pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang dipimpin oleh Ashraf Ghani, namun kondisi Afghanistan yang masih tidak stabil karena pasca perang 20 tahun membuat Taliban membutuhkan bantuan negara lain untuk dapat merekonstruksi Afghanistan. China sebagai negara yang memiliki perbatasan dengan

Afghanistan juga cukup berperan dalam upaya perdamaian dan stabilisasi Afghanistan. Dengan memanfaatkan keadaan, China juga membawa beberapa kepentingan terutama kepentingan keamanan wilayah, kepentingan-ekonomi, kepentingan tata-internasional, dan juga kepentingan ideologi.

2.1.1 Sejarah Konflik Afghanistan

Konflik Afghanistan berlangsung selama beberapa dekade dan telah melibatkan banyak pihak, baik pihak domestik maupun internasional. Konflik Afghanistan yang terlibat dalam The Great Game membuat Afghanistan selalu di bawah pengaruh kekuatan Inggris atau Uni Soviet. Hal ini terus berlangsung hingga invasi Uni Soviet pada tahun 1979 dan memunculkan perlawanan dari kelompok-kelompok Mujahidin, yang terdiri dari berbagai kelompok pemberontak Islamis yang berasal dari seluruh wilayah Afghanistan. Perlawanan yang dilakukan kelompok Mujahidin serta kondisi Uni Soviet yang saat itu hancur membuat kelompok Mujahidin berhasil merebut Afghanistan, namun muncul kelompok baru bernama Taliban. Dalam waktu beberapa tahun, Taliban berhasil menguasai Kabul dan mendirikan pemerintahan baru.

Konflik Afghanistan tidak berakhir begitu saja, pasca peristiwa 9/11 pada tahun 2002 menambah keterlibatan pihak asing di Afghanistan, yaitu Amerika Serikat yang berseteru dengan Taliban dan melakukan invasi di Afghanistan selama 20 tahun. Penarikan pasukan Amerika Serikat yang dimulai pada tahun

2020 dan disusul dengan kemenangan Taliban yang kembali menjadi pemerintah di Afghanistan pada Agustus 2021 mengakhiri konflik Afghanistan.

2.1.1.1 Perlawanan Mujahidin dalam Invasi Uni Soviet 1979

Konflik Afghanistan setelah The Great Game berakhir berubah menjadi perang internal untuk merebut kekuasaan tertinggi di Afghanistan hingga terjadi Revolusi Saur yang dilakukan oleh Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDPA) untuk menggulingkan kekuasaan Daud Khan (Steele, 2011). Namun, Pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan PDPA yang dipimpin oleh Taraki mendapat pertentangan dari masyarakat yang menilai bahwa paham komunis yang diusung PDPA tidak sesuai dengan nilai masyarakat Afghanistan, seperti penerapan kebijakan reformasi kolektivitas lahan dan derajat administratif yang berdasar Marxis-Leninisme klasik (Leake, 2022).

Pertentangan dari masyarakat tersebut membuat berbagai kelompok melakukan perlawanan, termasuk kelompok Mujahidin. Kelompok Mujahidin mendapatkan dukungan persenjataan dari Amerika Serikat dan juga pelatihan memakai senjata dari Islam Service Intelligence (ISI) untuk menggulingkan pemerintahan Afghanistan pada saat itu (Misra, 2002). Di saat pemberontakan dari Mujahidin mulai terjadi di beberapa titik di Afghanistan, kekuatan Taraki juga cenderung mulai melemah sehingga untuk menyelamatkan pemerintahan Hafizullah Amin melakukan penggulingan pemerintahan Taraki (Clements, 2003). Pada tahun 1979, Taraki ditangkap dan dibunuh sehingga Amin berhasil menjadi

kepala pemerintahan Afghanistan yang baru dan menguasai Afghanistan sepenuhnya. Pemerintahan Amin yang tidak kooperatif membuat Uni Soviet mengutus pasukan khusus Spetsnaz untuk melakukan rencana operasi pembunuhan Amin yang dinamakan “Operation Storm-333” (Dick, 2012). Pasukan khusus Spetsnaz berhasil membunuh Amin dan juga melakukan invasi ke Afghanistan pada tahun 1979 setelah itu USSR menjadikan Babrak Karmal sebagai pemimpin baru Afghanistan.

Meskipun Afghanistan masih di bawah pengaruh Uni Soviet, Mujahidin tetap memberikan perlawanan dengan serangan gerilya, peledakan bom, dan pertempuran dengan pasukan Uni Soviet. Dukungan Amerika Serikat dan ISI kepada Mujahidin tidak serta merta membuat awal perlawanan kelompok Mujahidin dapat dilakukan dengan mudah. Kondisi geografis Afghanistan yang didominasi oleh pegunungan dan juga dataran tinggi. Selain itu Mujahidin lebih memilih menggunakan taktik gerilya sedangkan Uni Soviet membalas dengan serangan besar-besaran di Lembah Panjshir (S. Tanner, 2002). Serangan Uni Soviet terhadap Afghanistan menjadi serangan terbesar Uni Soviet selama perang dingin dan hal ini membuat sumber daya Uni Soviet semakin menurun.

Kekalahan yang beruntun yang dialami Uni Soviet serta kecaman dari PBB membuat Mikhail Gorbachev memutuskan untuk menarik mundur pasukan dan berfokus glasnost dan perestorika. Selain itu Uni Soviet mencopot Karmal dan menggantinya dengan Najibullah yang merupakan mantan kepala polisi rahasia

Afghanistan. Konflik berakhir setelah penandatanganan Perjanjian Jenewa pada tahun 1988 dan dilanjutkan penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan yang dilakukan secara bertahap hingga awal tahun 1989.

Namun Pemerintahan Najibullah mulai goyah ketika terjadinya kekalahan oleh pemerintah pada perang di berbagai titik di Afghanistan, seperti Khost, Herat, dan juga Kandahar (S. Tanner, 2002). Bubarnya Uni Soviet membuat keadaan semakin buruk dan situasi ini menjadi momen yang tepat untuk Mujahidin mengambil alih pemerintahan dan melakukan penyerangan ke beberapa titik yang masih di bawah pemerintahan Najibullah. Keberhasilan Mujahidin dalam merebut Kabul dan akhirnya Najibullah memutuskan untuk mengundurkan diri sehingga Afghanistan jatuh ke tangan Mujahidin.

Kekuasaan Mujahidin di Afghanistan tidak serta merta meredakan konflik di Afghanistan. Kekalahan perang di Jalalabad dan juga keinginan tiap kelompok untuk merebut kekuasaan membuat berbagai kelompok dalam Mujahidin yang bersatu sebelumnya melawan Uni Soviet mulai menyerang satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik berkelanjutan, para pemimpin kelompok tersebut bertemu di Peshawar, Pakistan merundingkan pembagian kekuasaan kepada setiap kelompok secara adil, namun perundingan ini gagal karena salah satu kelompok mereka berusaha untuk menguasai seluruh Afghanistan dan berakhir berperang satu sama lain.

2.1.1.2 Kemunculan Taliban dan Konflik Pasca 9/11

Selama perang antar kelompok Mujahidin berlangsung, tahun 1994 muncul kelompok militan Islam di provinsi Kandahar, Afghanistan yang bernama Taliban. Kelompok ini berisi siswa-siswa yang berasal dari madrasah yang terletak di bagian selatan Afghanistan dan juga perbatasan Afghanistan—Pakistan sehingga kata Taliban sendiri berasal dari Bahasa Pashtun yang memiliki arti “siswa”. Pergerakan Taliban dalam merebut berbagai titik di selatan dan juga barat Afghanistan sebelum akhirnya dapat menguasai Kabul didukung oleh masyarakat etnis Pashtun dan juga badan intelijen dari Pakistan (S. Tanner, 2002). Pemimpin Kelompok Hizbul Islami, Hekmatyar harus takluk mengakui kekuatan Taliban saat berhasil merebut Kota Ghazni dan Jalalabad. Kekuatan Taliban yang besar dan ekspansi yang cukup masif di berbagai wilayah membuat Mujahidin yang sebelumnya berperang satu sama lain kembali bersatu untuk mengalahkan Taliban, namun gagal. Pada tahun 1996, Taliban dapat menguasai Kabul saat mengalami kekosongan kekuasaan dan telah ditinggalkan oleh Mujahidin.

Setelah berhasil merebut Afghansitan, kelompok Taliban mendirikan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar sebagai Amirul Mukminin atau Pemimpin Orang Mukmin. Ia juga menjabat sebagai Kepala Dewan Kepemimpinan Taliban dan secara efektif memimpin negara tersebut sebagai kepala negara. Taliban dikenal sebagai kelompok pergerakan Islam yang ultra-konservatif sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat Taliban

terkenal represif dan menerapkan syariat Islam secara ketat dan keras di seluruh wilayah yang mereka kuasai. Ini termasuk pelarangan minuman keras, judi, dan zina, serta hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bagi para pelanggar. Berbagai peraturan dan larangan yang menimbulkan kontroversi dibuat pada masa pemerintahan Taliban (Matinuddin, 1999). Larangan untuk melestarikan budaya dan kesenian di Afghanistan dimana Taliban menghancurkan banyak situs bersejarah dan keagamaan, termasuk patung-patung Buddha besar yang terkenal di Bamyān. Mereka juga melarang musik dan tari, serta menutup bioskop dan teater.

Kebijakan Taliban juga dinilai tidak memihak kepada perempuan, seperti larangan wanita untuk bekerja. Taliban melarang wanita bekerja di luar rumah, kecuali di bidang kesehatan. Ini mengakibatkan banyak wanita kehilangan pekerjaan mereka, yang menyebabkan banyak keluarga miskin semakin menderita. Selain larangan untuk bekerja Taliban juga melarang perempuan mendapatkan akses pendidikan. Taliban melarang perempuan dan gadis-gadis dari pendidikan formal, kecuali di lembaga-lembaga khusus yang dijalankan oleh wanita dan hanya mengajarkan subjek-subjek tertentu. Hal ini membatasi kesempatan pendidikan bagi perempuan dan memperburuk kemiskinan di kalangan mereka.

Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar sebagai Amirul Mukminin atau Pemimpin Orang Mukmin dan sekaligus sebagai kepala negara. Kabinet pemerintahan di bawah Mullah Omar, beberapa di antaranya menempati jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya,

seperti Menteri Kesehatan dan Gubernur Bank Negara yang diisi oleh panglima militer yang siap meninggalkan jabatan pemerintahannya untuk berperang bila diperlukan (Rashid, 2001). Hal ini menyebabkan kekacauan pada konstitusi dan administrasi Afghanistan. Mullah Omar memimpin Taliban hingga tahun 2001 ketika kelompoknya digulingkan oleh pasukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001 yang dikenal dengan nama 9/11.

Al-Qaeda sebagai dalang dari serangan 9/11 memiliki hubungan dekat dengan kelompok Taliban sehingga Amerika Serikat menduga Taliban membantu persembunyian pemimpin Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden. Saat Amerika Serikat meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, Taliban menolak permintaan tersebut dan telah berulang kali menyangkal bahwa mereka memiliki hubungan resmi dengan Al-Qaeda. Namun karena invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan koalisi internasional di Afghanistan membuat Taliban memutuskan untuk bertempur melawan agar mendapatkan kembali kedaulatan Afghanistan (Gall, 2004). Hal ini membuat konflik Afghanistan berlanjut antara Amerika Serikat dan Kelompok Taliban meskipun Osama bin Laden telah mati terbunuh pada tahun 2012.

Setelah melakukan perundingan, Amerika Serikat dan Taliban secara resmi menandatangani perjanjian damai pada 29 Februari 2020 di Doha dan sekaligus mengakhiri konflik di antara keduanya selama 20 tahun. Perjanjian tersebut diberi

judul “*Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America*” atau dapat disebut sebagai Perjanjian Doha. Dalam perjanjian tersebut berisi empat poin yang disepakati, yaitu:

- (1) Jaminan dan mekanisme penegakkan hukum yang mencegah penggunaan militer Afghanistan oleh individu maupun kelompok manapun untuk mengganggu Amerika Serikat dengan sekutu;
- (2) Jaminan, mekanisme penegakkan, dan pengumuman batas waktu penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan;
- (3) Setelah pengumuman jaminan untuk penarikan penuh pasukan asing dan jadwal di hadapan saksi internasional, dan jaminan dan pengumuman di hadapan saksi internasional bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya, Imarah Islam Afghanistan yang tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara dan dikenal sebagai Taliban akan memulai negosiasi intra-Afghanistan dengan pihak Afghanistan pada 10 Maret 2020, yang sesuai dengan 15 Rajab 1441 pada penanggalan Imlek Hijriah dan Hoot 20, 1398 pada kalender Surya Hijriah
- (4) Gencatan senjata permanen dan komprehensif akan menjadi salah satu agenda dialog dan negosiasi intra-Afghanistan. Para peserta negosiasi intra-Afghanistan akan membahas tanggalnya dan modalitas gencatan senjata permanen dan

komprehensif, termasuk mekanisme implementasi bersama, yang akan diumumkan bersamaan dengan penyelesaian dan kesepakatan atas peta jalan politik Afghanistan di masa depan (United State Embassy, 2020).

Implementasi dari perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban mulai terealisasi. Sebanyak 5000 anggota Taliban yang dipenjara akhirnya dibebaskan, termasuk 400 orang yang telah dinyatakan bersalah atas perilaku kriminal seperti pembunuhan juga dibebaskan (Mashal & Faizi, 2020). Amerika Serikat juga mulai melakukan penarikan pasukan secara bertahap dan memakan waktu sekitar 9 bulan. Walaupun konflik antara Amerika Serikat dan Taliban telah berakhir, Amerika Serikat tidak ikut campur dalam proses negosiasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban sehingga masih terdapat konflik intra-Afghanistan.

Konflik antara pemerintah Afghanistan di bawah Ashraf Ghani dan Taliban tidak berlangsung lama karena Taliban melakukan serangan sejak Mei 2021 lalu bersamaan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat. Usaha Taliban dalam merebut berbagai wilayah di Afghanistan dilakukan secara bertahap dimulai dengan keberhasilan Taliban dalam merebut 73 distrik hingga berhasil menguasai 223 distrik (Roggio, 2021). Taliban juga melakukan penyerangan dan berhasil merebut seluruh ibu kota provinsi kecuali Bazarak, Ibu Kota Provinsi Panjshir dan hingga akhirnya pada 15 Agustus 2021 Taliban mengepung Kabul dari berbagai penjuru, seperti Distrik Kalakan, Distrik Qarabagh, dan Distrik Paghman (Aljazeera, 2021). Ashraf Ghani melarikan diri ke Pakistan dan Taliban berhasil

mengambil kekuasaan pada pusat pemerintahan di Kabul tanpa ada perlawanan sehingga Taliban menjadi pemegang kekuasaan baru di Afghanistan.

2.1.2 Kondisi Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Ashraf Ghani pada akhirnya tidak dapat mempertahankan kendali atas negara tersebut dan Taliban berhasil merebut kendali atas ibu kota Kabul dan mengakhiri pemerintahan Ghani. Sesuai dengan pernyataan Taliban yang tidak akan merebut Kabul dengan paksa, Ashraf Ghani terbukti langsung meninggalkan Afghanistan dengan membawa keluarga dan juga dua asisten rumah tangganya (Aljazeera, 2021). Pejabat Afghanistan mengatakan, bahwa Ashraf Ghani meninggalkan istana kepresidenan menuju ke kedutaan Amerika Serikat dan sejak meninggalkan Afghanistan, Ashraf Ghani sudah tidak lagi menjadi presiden Afghanistan (Rosenberg & Nossiter, 2021). Ghani berpendapat, melalui tulisannya di media social facebook, bahwa alasan Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan untuk menghindari adanya pertumpahan darah dan melindungi warga sipil. Dalam pidato Ashraf Ghani yang terekam di Uni Emirat Arab pada tanggal 18 Agustus, Ashraf Ghani mengakui bahwa Ashraf Ghani melarikan diri untuk menghindari hukuman gantung dan Ashraf Ghani juga bersumpah untuk kembali lagi ke Afghanistan pada saatnya nanti (Gall, 2021).

Beberapa pejabat dan politisi Afghanistan mengkritik Ghani karena meninggalkan negara pada saat yang sulit dan memperburuk situasi krisis yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. Mereka menganggap tindakan tersebut

sebagai keputusan egois yang tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat dan negara. Beberapa politisi juga menuduh Ghani melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri selama menjabat sebagai presiden. Mantan Anggota Parlemen Afghanistan sekaligus menjadi mantan juru bicara Ashraf Ghani, Elay Irsyad, mengatakan bahwa Ashraf Ghani tidak memiliki nyali karena memutuskan untuk melarikan diri (Duffy, 2021). Duta Besar Afghanistan, Mohammad Zahir Aghbar, mengatakan Interpol harus menangkap Ashraf Ghani atas penggelapan dana negara (India Today, 2021). PBB menghapus Ashraf Ghani dari daftar presiden per tanggal 15 Februari 2022 dan Naseer Ahmad Faiq sebagai Kuasa Urusan Afghanistan dalam daftar perwakilan tetap, namun pernyataan resmi PBB menyatakan bahwa Mohammad Wali Naeem yang menempati posisi tersebut (Taieb, 2022).

Pada 16 Agustus 2021, juru bicara Taliban, Mohammad Naeem, dalam wawancara dengan Al Jazeera, mengatakan bahwa perang telah berakhir dan Taliban telah mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini. Taliban tidak akan mempergunakan Afghanistan sebagai alat perlawanan kepada siapa pun dan tidak ingin menyakiti siapa pun, tambah Mohammad Naeem (NDTV, 2021). Namun kemenangan Taliban tetap terlihat sebagai petaka untuk masyarakat Afghansitan, dimana sebanyak 300 warga sipil Afghanistan terancam mendapat serangan balasan oleh Taliban karena telah bekerja untuk Pemerintah Amerika Serikat dan ribuan pengungsi ditahan di sepanjang perbatasan Turki—Iran dan

juga banyak pengungsi yang melewati Turki untuk menuju ke wilayah Eropa (Reuters, 2021b).

Beberapa negara memberikan pernyataan kesediaannya untuk menampung pengungsi, seperti Kanada yang mengatakan siap untuk menampung lebih dari 20.000 warga Afghansitan dan Britania Raya juga menyatakan akan melakukan hal yang sama dengan Kanada. Amerika Serikat mengatakan akan melakukan relokasi pelamar (*Special Immigrant Visa*) SIV yang menuju ke Amerika yang sebelumnya berjumlah 20.000 bertambah menjadi 30.000 orang (Elgot et al., 2021). Selain Kanada dan Amerika Serikat, India juga mengatakan akan mengeluarkan visa elektronik darurat untuk semua masyarakat Afghanistan yang ingin memasuki negaranya (Ministry of External Affairs Government of India, 2021). Kondisi Afghanistan beberapa saat setelah jatuhnya Kabul ke dalam genggaman Taliban semakin menunjukkan kekacauan dan ketakutan masyarakat Afghanistan akan kembalinya rezim Taliban pada tahun 1996 yang penuh dengan kekerasan.

2.2 Pemerintahan Afghanistan Pada Masa Taliban (Tahun 2021—Sekarang)

Setelah Ashraf Ghani lengser dari jabatannya sebagai Presiden Afghanistan, Taliban mengambil alih pemerintahan dan melakukan transisi sistem pemerintahan dari pemerintahan sebelumnya. Setelah beralih dari kelompok pemberontak menjadi sebuah pemerintahan fungsional, Taliban melakukan beberapa perubahan di Afghanistan, seperti pemberlakuan interpretasi yang cukup ketat pada hukum islam sehingga suasana pemerintahan Afghanistan di bawah rezim Afghanistan pada tahun 1996 terasa kembali.

Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada muncul untuk pertama kali sebagai *supreme leader* Afghanistan pada September 2021 sejak Taliban berhasil menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 (CNN Indonesia, 2021). Kemunculannya dilanjutkan dengan sambutan yang sama sekali tidak bernuansa politik, namun justru bernuansa agamis dan meminta keridaan Tuhan Yang Maha Esa untuk pemerintahannya di Afghanistan dan juga menegaskan kepada pemerintahan sementara pada saat itu untuk menegakkan syariah di Afghanistan. Pada 3 Desember 2021, Haibatullah Akhundzada membuat beberapa kebijakan yang mengatur hak-hak perempuan berdasarkan syariah, seperti perempuan punya hak untuk menentukan perkawinan dan tidak boleh diperlakukan seperti properti, perempuan yang berstatus janda diperbolehkan untuk menikah dengan suami baru, dan pembagian warisan secara merata (TOLONews, 2021). Haibatullah Akhundzada juga memerintahkan Kementerian Haji dan Agama, Kementerian Informasi dan Kebudayaan, dan Mahkamah Agung untuk menginstruksikan implementasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat Afghanistan. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Taliban pada akhirnya mempengaruhi aspek-aspek di Afghanistan, di antaranya yaitu aspek kemanusiaan, politik, ekonomi, kebebasan pers, dan juga pendidikan.

Aspek kemanusiaan pada masa pemerintahan Haibatullah Akhundzada menjadi sorotan komunitas internasional karena kebijakan dan hukum yang dibuat oleh Haibatullah Akhundzada dan juga petinggi Taliban yang lain dinilai melanggar hak asasi manusia. PBB telah melaporkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan

oleh Taliban sejak menjabat menjadi otoritas resmi di Afghanistan dimana sebesar 39,59% dari seluruh organisasi berita di Afghanistan ditutup dan 59,86% jurnalis, khususnya jurnalis wanita berhenti dari profesinya karena adanya intimidasi jurnalis dan juga pembatasan kebebasan pers oleh Taliban (Reporters Without Borders, 2022). Selanjutnya Afghanistan membentuk kembali Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan untuk mengatur pemberlakuan larangan terhadap perilaku-perilaku yang dianggap tidak islami dan sesuai dengan syariat yang dianut Taliban. Para hakim di Afghanistan diperintahkan oleh Pemimpin Tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, untuk menegakkan interpretasi syariah sehingga beberapa minggu setelahnya pihak berwenang menjatuhkan hukum cambuk dan eksekusi di depan publik. Sudah lebih dari 100 pria dan juga wanita dilaporkan telah dihukum cambuk di beberapa provinsi di Afghanistan di antaranya, yaitu Takhar, Logar, Laghman, Parwan, dan Kabul (Noorani, 2022). PBB telah mengingatkan Afghanistan terkait perjanjian PBB yang melarang penyiksaan dan juga pemberian hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan juga merendahkan martabat.

Selain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi Afghanistan juga terdampak setelah pemerintahan secara resmi dikuasai Taliban, Setelah pengambilalihan kekuasaan tersebut, terjadi kekhawatiran yang signifikan tentang stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut, sehingga banyak investor dan bisnis internasional yang menunda atau menghentikan investasi di Afghanistan. Selain itu, perang sebelumnya yang berkepanjangan dan tidak stabil selama beberapa dekade telah menghambat pertumbuhan

ekonomi Afghanistan dan bahkan menimbulkan krisis ekonomi. Hal ini yang akhirnya membuat tingkat kemiskinan dan inflasi di Afghanistan semakin meroket berdasarkan laporan Bank Dunia pada “Afghanistan Economic Monitor” menunjukkan Inflasi dan harga-harga, terutama untuk kebutuhan pokok rumah tangga, semakin meningkat. Data Bank Dunia, yaitu pada Afghanistan Economic Monitor menunjukkan inflasi Year of Year (Y-o-Y) telah mencapai 12,7 persen pada Desember 2021 dari sebelumnya, yaitu 9,2 persen pada November 2021 (World Bank, 2022). Perekonomian Afghanistan tidak dapat dikatakan stabil dan cenderung rentan karena ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan.

Taliban sendiri belum memiliki rencana ekonomi yang jelas dan konkrit. Selama pemerintahan sebelumnya, Afghanistan bergantung pada bantuan internasional dan ekspor opium sebagai sumber pendapatan utama. Taliban secara mengejutkan berhasil membantu pemasukan anggaran pemerintah sebesar 840 juta USD dari Desember 2021 hingga Juni 2022 yang 56% dihasilkan dari cukai dan ekspor batu bara dan juga buah-buahan ke Pakistan. Menurut peneliti dari *The Economist*, David Mansfield, yang telah mempelajari perekonomian Afghanistan selama 25 tahun mengatakan, bahwa Taliban diperkirakan telah memiliki penghasilan di kisaran 27,5—35 juta USD per tahun berkat pajak perdagangan narkoba tersebut (Zakariya, 2022). Namun, Taliban telah menegaskan bahwa mereka akan menghentikan produksi dan perdagangan narkoba, yang dapat mempengaruhi pendapatan negara. Secara keseluruhan, perekonomian Afghanistan saat ini masih dapat dikatakan belum stabil dan bergantung pada langkah-langkah yang akan

diambil oleh pemerintahan Taliban untuk merekonstruksi infrastruktur dan menstabilkan ekonomi negara.

Sektor pendidikan di Afghanistan juga terpengaruh oleh kejatuhan pemerintahan ketangan Taliban pada tahun 2021. Kekhawatiran besar tentang kebijakan Taliban dalam mendukung pendidikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan juga bermunculan. Kekhawatiran ini muncul karena pada Taliban pernah membatasi akses perempuan dan anak-anak perempuan ke pendidikan selama masa pemerintahan sebelumnya, yang memperburuk aksesibilitas pendidikan bagi mereka. Setelah pengambilalihan kekuasaan saat ini, Taliban mengatakan bahwa mereka akan mendukung pendidikan, tetapi masih belum jelas sejauh mana dukungan mereka akan diberikan. Taliban sempat berjanji untuk membuka sekolah menengah (SMP dan SMA) untuk perempuan pada awal Maret 2022, namun rencana tersebut diundur oleh Taliban dengan alasan masih mempersiapkan perencanaan pemisahan fasilitas sekolah berdasarkan gender. Akan tetapi, beberapa sekolah di daerah utara seperti Kunduz dan Mazar-i-Sharif masih menerima beberapa siswa perempuan dan sekolah yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Swedia, Committee for Afghanistan (SCA) juga tetap buka (Zakariya, 2022). Perbedaan ini membuat Taliban terlihat belum bisa memberlakukan kebijakan secara merata dan juga tentatif terhadap isu-isu utama dan sektor pendidikan di Afghanistan saat ini menghadapi tantangan besar dan memerlukan dukungan dan perhatian dari pemerintahan Taliban untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang di negara tersebut tanpa diskriminasi dan dengan aman.

Walaupun pemerintahan Taliban berjalan begitu lama, namun telah dilaporkan bahwa Taliban telah membentuk kabinet dan mengumumkan bahwa mereka akan memerintah dengan cara yang lebih moderat dan inklusif daripada ketika mereka memerintah sebelumnya. Namun, masih ada banyak kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan perlindungan minoritas di bawah pemerintahan Taliban, dan situasi di Afghanistan terus berubah secara dinamis.

2.3 Respons Negara Lain Terhadap Taliban Sebagai Pemerintahan Baru Afghanistan

Perpindahan kekuasaan ke tangan Taliban setelah konflik berakhir pada tahun 2021 membuat berbagai dampak, baik dari tingkat domestik, maupun tingkat internasional. Dampak di tingkat domestik salah satunya, yaitu krisis kemanusiaan sangat dirasakan oleh masyarakat terutama kaum perempuan. Taliban menerapkan sistem pemerintahan sesuai dengan syariat Islam menurut kelompoknya dan hal ini dilaksanakan dengan sangat ketat, kebijakan peraturan sudah Taliban tetapkan saat Taliban sempat berkuasa di Afghanistan tahun 2001 dan diterapkan kembali saat Taliban berkuasa.

Berbagai peraturan yang ditetapkan seperti harus selalu melaksanakan sholat tepat waktu dan melaksanakan dengan berjamaah, pelaku tindakan pencurian dihukum potong tangan, media massa seperti radio hanya dipergunakan untuk mendengarkan berita dan juga kajian agama, melarang musik kecuali musik bernuansa islami (nasyid) dan masih banyak lagi. Untuk perempuan, terdapat beberapa peraturan, seperti tidak diperbolehkan untuk menggunakan busana yang memperlihatkan auratnya sehingga wajib menggunakan burqa, tidak boleh berolahraga, tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali

pada layanan kesehatan, tidak diperbolehkan untuk mendapat pendidikan, dan masih ada beberapa peraturan khusus untuk perempuan lainnya (Iwan, 2002). Peraturan ini mendapat respons negatif dari sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat juru bicaranya Stephane Dujarric yang mengatakan, bahwa kebijakan tersebut dapat sangat berpengaruh negatif dan bahkan dapat merusak generasi kaum perempuan dan masa depan Afghanistan (BBC, 2022).

Berkuasanya Taliban di Afghanistan di tahun 2021 juga membuat perekonomian Afghanistan semakin mengalami kemunduran hingga krisis ekonomi. Data dari Bank Dunia, Afghanistan Economic Monitor, menunjukkan inflasi Y-o-Y telah mencapai 12,7 persen pada Desember 2021 dari sebelumnya, yaitu 9,2 persen pada November 2021 dan hal ini menyebabkan harga barang terutama kebutuhan pokok rumah tangga terus meningkat. Hal ini diikuti dengan nilai tukar yang juga terus menerus mengalami depresiasi secara bertahap terhadap mata uang perdagangan utama (World Bank, 2022).

Dampak berikutnya, yaitu sanksi luar negeri untuk Afghanistan berkurang semenjak Afghanistan dikuasai oleh Taliban sebagai respons negara-negara yang tidak menyambut Taliban sebagai pemegang pemerintahan Afghanistan. Sanksi ekonomi dan juga penangguhan bantuan kemanusiaan pasca Taliban berkuasa salah satunya disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Taliban yang kontroversial terhadap kemanusiaan di Afghanistan terutama kaum perempuan. Amerika Serikat menjadi negara yang memberikan sanksi kepada Afghanistan berupa penahanan atau pembekuan asset Afghanistan sebesar 9,5 M USD dengan maksud untuk mencegah Taliban dapat

mengakses Bank Sentral Afghanistan (Mohsin, 2021). Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Jerman (BMZ), Svenja Schulze, mengatakan, bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat didistribusikan dengan baik bila perempuan tidak diperbolehkan bekerja dalam organisasi non pemerintah dan hal ini mengakibatkan banyak organisasi menghentikan operasi mereka. Organisasi non pemerintah asal Jerman, Welthungerhilfe (WHH), yang telah mendapat bantuan sebesar 12 juta euro dari pemerintah Jerman tahun 2022 terpaksa tidak dapat mendistribusikan bantuannya bila kondisi masih tidak berpihak kepada perempuan (Knight, 2022).

Respons negara-negara yang mengecam pemerintahan Taliban. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memberikan remark dan statement-nya pada 16 Agustus 2021, sehari sesudah Taliban memenangkan perang, sebagai respons Amerika Serikat terhadap kondisi Afghansitan. Biden mengatakan, satu-satunya kepentingan nasional vital Amerika Serikat tetap sama seperti dulu, yaitu menangkal serangan teroris terutama di Amerika Serikat dan pilihan yang diambil Amerika Serikat adalah untuk setuju dan bersiap untuk memerangi Taliban kembali. Biden menjelaskan beberapa misi yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu sedang mengerahkan 6000 tentara Amerika Serikat untuk membantu evakuasi personel Amerika Serikat, sekutu dan warga Afghanistan yang rentan ke tempat yang lebih aman di luar Afghanistan, selain itu Amerika Serikat akan memberikan bantuan untuk memindahkan lebih banyak warga Afghanistan yang memenuhi syarat Special Immigrant Visas (SIV) untuk keluar dari Afghanistan serta

memperluas akses pengungsi. Amerika Serikat juga akan menarik pasukan militer untuk mengakhiri perang selama 20 tahun ini. (White House Governance, 2021).

Respons lain dilontarkan oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dimana menurutnya tidak seorang pun yang boleh mengakui Taliban secara bilateral sebagai pemerintah Afghanistan. Selain itu Inggris juga menginginkan semua bersama untuk bersatu mencegah Afghanistan menjadi tempat teroris (Reuters, 2021a). Dalam remarknya tanggal 18 Agustus 2022, Boris Johnson memberikan beberapa pendekatan yang dilakukan Inggris untuk situasi Afghanistan pada saat itu. Yang pertama Inggris akan fokus untuk membantu evakuasi warga negara Inggris dan masyarakat Afghanistan yang telah membantu Inggris selama perang, kemudian Inggris mendukung upaya bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan. Inggris juga akan berfokus pada pembuatan rute yang aman dan resmi untuk warga Afghanistan yang ingin menuju ke Inggris (gov.uk, 2021).

Kemudian respons juga dikeluarkan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dimana dalam pidatonya, ia mengatakan Prancis memiliki musuh dan misi yang sama seperti Amerika Serikat, yaitu melawan teroris dan akan mengambil inisiatif serta berkoordinasi dengan negara-negara Eropa lain dan sekutu Prancis. Beberapa langkah yang diambil Prancis dalam merespons Afghanistan di bawah Taliban, yaitu akan berfokus pada upaya untuk memerangi terorisme Islam dan segala bentuknya. Prancis melihat kelompok teroris hadir di Afghanistan dan akan memanfaatkan kondisi Afghanistan yang sedang mengalami destabilisasi. Selanjutnya adalah destabilisasi

Afghanistan yang akan meningkatkan ketidakteraturan migrasi ke wilayah Eropa dan Prancis harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu dari bahaya migrasi ke depan. Yang terakhir, Prancis menyerukan untuk terus mempertahankan prinsip untuk mewujudkan kesetaraan dengan mengutamakan hati nurani (Elysée, 2021).

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga memberikan repons terkait kondisi Afghanistan di bawah Taliban. Josep Borrell mengatakan, bahwa telah melakukan pertemuan luar biasa dengan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dan dalam pertemuan itu dihasilkan beberapa tujuan-tujuan yang menjadi prioritas Eropa. Prioritas pertama, yaitu memastikan proses evakuasi aman bagi semua pihak. Yang kedua memastikan situasi politik baru di Afghanistan tidak mengarah pada gerakan migrasi yang masif ke Eropa. Yang ketiga, pihak Uni Eropa harus menghubungi Taliban sebagai pemerintahan baru di Afghanistan terlepas masalah yang sedang terjadi untuk berdialog mengenai bencana kemanusiaan, potensi migrasi, dan krisis kemanusiaan. Josep Borrell juga menyatakan dalam sesi tanya jawab bersama wartawan, bahwa Uni Eropa belum mengatakan akan mengakui Taliban dan akan ada persyaratan untuk menentukan hubungan Afghanistan dan Uni Eropa ke depan terutama dengan melihat latar belakang masalah dan kondisi ekonomi politik kedua negara (European Union External Action, 2021).

Berbeda dari respons negatif dari negara-negara barat, terdapat beberapa negara yang memberikan respons positif terkait kondisi Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Russia memberikan respons positif terhadap pemerintahan Kabul yang baru. Menurut

Duta Besar Rusia untuk Afghanistan, Dmitry Zhirnov, Situasi dalam Kabul jauh membaik sejak hari pertama sejak Taliban kuasai pemerintahan Afghanistan dan lebih baik daripada di bawah pemerintahan Ashraf Ghani. Russia juga akan tetap membuka kedutaan di Kabul dan akan tetap berfungsi seperti biasa (TASS, 2021).

Selain Russia, Pakistan juga memberikan respons positif terkait keberhasilan Taliban. Dalam cuitannya dalam Twitter, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan telah membuka dialog bersama Taliban sebagai pemerintahan Afghanistan yang baru untuk memastikan Afghanistan di bawah Taliban menjadi negara yang damai dan inklusif serta menjaga stabilitas Afghanistan dan wilayah sekitarnya. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan telah berdiskusi secara rinci dengan Presiden Tajik, Emomali Rahmon mengenai pemerintahan Afghanistan yang diharapkan dapat inklusif dimana terdapat masyarakat dari Tajik, Hazaras, dan Uzbek (Associated Press in Islamabad, 2021). Pakistan juga menyambut Taliban yang berencana untuk bergabung pada China—Pakistan Economic Corridor (CPEC) tepatnya setelah berhasil meyakinkan Pakistan untuk menjalani pemerintahan yang baik dan tidak ditunggangi kepentingan kelompok lain (Uddin, 2021).

China menjadi salah satu negara yang juga merespons baik Taliban sebagai pemerintahan yang baru di Afghanistan. Dalam sesi tanya jawab pada Konferensi Pers Rutin 16 Agustus 2021, Kementerian Luar Negeri China, lewat juru bicaranya, Hua Chunying, mengatakan bahwa China masih memiliki hubungan yang baik dengan Afghanistan, bahkan dengan Taliban. Setelah Afghanistan dikuasai Taliban pada 15

Agustus, China segera melakukan dialog dengan petinggi Taliban untuk membicarakan mengenai bagaimana pemerintahan Afghanistan kedepan dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. China menghormati penuh kedaulatan Afghanistan dan China sendiri memiliki tidak akan melakukan intervensi pada urusan dalam negeri Afghanistan. Hua Chunying menambahkan, bahwa China siap untuk terus mengembangkan kerja sama bertetangga baik dan bersahabat dengan Afghanistan dan berperan secara konstruktif dalam perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan (Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Netherlands, 2021). Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, memberikan beberapa statement kepada media sebelum meninggalkan Doha. Wang Yi mengatakan, bahwa China memberikan empat harapan untuk Afghanistan dan hubungan Afghanistan dengan negara lain terutama dengan negara tetangga, seperti membangun struktur politik yang lebih terbuka dan inklusif, Afghanistan di bawah Taliban dapat menerapkan kebijakan, baik di dalam, maupun luar negeri yang lebih moderat dan juga hati-hati terutama tentang hak perempuan dan anak, Taliban harus memutus hubungan dengan semua kekuatan teroris manapun dan memeranginya, dan dapat mengejar politik luar negeri yang damai terutama terhadap negara tetangga Afghanistan. Wang Yi menambahkan, bahwa kebijakan China terhadap Afghanistan sudah jelas dan konsisten dimana China menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan juga integritas wilayah Afghanistan (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2021)

2.4 Dinamika Hubungan China—Afghanistan

Sejarah hubungan antara China dan Afghanistan telah berlangsung selama berabad-abad, dan hubungan kedua negara tersebut telah bervariasi seiring waktu. Pada masa lalu, hubungan antara China dan Afghanistan didasarkan pada perdagangan dan budaya, tetapi sejak akhir abad ke-20, hubungan politik antara kedua negara tersebut telah menjadi semakin kompleks. China juga berperan dalam membantu Afghanistan dalam menciptakan perdamaian dan juga membangun kembali pasca-perang, terutama dalam hal investasi dan perdagangan.

Hubungan antara China dan Afghanistan tidak selalu mulus. Terutama karena kebijakan Beijing yang menentang separatisme, ekstremisme dan terorisme, yang mengarah pada ketegangan dengan Taliban yang pada saat itu sempat menduduki pemerintahan dan saat ini kembali menguasai pemerintahan Afghanistan. Taliban disinyalir memiliki hubungan dekat dengan beberapa kelompok militan di wilayah Xinjiang China terutama East Turkestan Islamic Movement (ETIM). Namun pada akhir tahun 2021, China memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Kebijakan ini disinyalir membawa beberapa kepentingan China di Afghanistan.

Afghanistan sendiri merupakan negara yang memiliki posisi yang strategis di kawasan Asia Tengah dan terletak di persimpangan antara Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Negara ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk tambang emas, perak, tembaga, besi, gas alam, dan minyak bumi, namun karena destabilitasi politik,

konflik dan perang yang berlangsung lama, keterbatasan teknologi, dan kurangnya investor membuat Afghanistan masih sulit untuk mengembangkan sumber daya alamnya.

2.4.1 Hubungan Diplomatik China—Afghanistan

2.4.1.1 Awal Hubungan Hingga Masa Perang Dunia II

Hubungan antara China dan Afghanistan telah ada sejak masa Dinasti Han (206 SM—220 M) karena pada saat itu, jalur sutra di Asia Tengah menjadi penting bagi perdagangan dan hubungan diplomatik antara China dan berbagai kerajaan di kawasan itu. Sampai pada zaman Dinasti Qing yang melakukan ekspansi ke Afghanistan dan membuat hubungan antara kaum Durrani yang pada saat itu memimpin Afghanistan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Qing, sekaligus membuat hubungan antara China dan Afghanistan pada zaman Dinasti Qing menjadi kurang baik.

Setelah Perang Dunia II, hubungan antara China dan Afghanistan semakin erat karena adanya dukungan dari China terhadap gerakan kemerdekaan Afghanistan. Namun, setelah Revolusi Saur pada tahun 1979, China hubungan antara China dan Afghanistan menjadi rumit dan bergolak selama beberapa tahun (Halliday, 1978). Pada awalnya, China mendukung pemerintah baru Afghanistan karena kedua negara memiliki ideologi yang sama dan China ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara yang berbagi ideologi yang sama. Namun, hubungan antara kedua negara mulai memburuk ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan pada akhir tahun 1979. China, yang pada saat itu memiliki hubungan

yang tegang dengan Uni Soviet, menentang intervensi Uni Soviet di Afghanistan dan memberikan dukungan terbatas kepada pemberontak Mujahidin dan China melihat Afghanistan sebagai sebuah ancaman karena berhubungan erat dengan Uni Soviet (Fingar, 2016). Hubungan China dan Afghanistan mulai membaik, bahkan semakin membaik setelah Uni Soviet mengalami kemunduran dan keruntuhan pada tahun 1991.

2.4.1.2 Hubungan China—Afghanistan Pasca Runtuhnya Uni Soviet Tahun 1991

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan antara China dan Afghanistan terus berkembang dan mengalami peningkatan yang signifikan. China dan Afghanistan telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1955, dan setelah kemerdekaan Afghanistan pada tahun 1992, hubungan tersebut terus berkembang. Namun kondisi berbeda ketika Taliban berhasil menguasai Afghanistan dimana sebelumnya China mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan pada tahun 1996 dan menjalin hubungan diplomatik resmi dengan mereka menjadi berbalik arah dan kerap mengalami ketegangan. Akhirnya China memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taliban dan tidak mengakui pemerintahan Taliban (Huasheng, 2016). Hal ini berdasar pada kekhawatiran China terhadap hubungan erat Taliban dengan Teroris Turkistan Timur dan juga kondisi Afghanistan yang jauh dari kata stabil dan memicu kekacauan yang menyebar hingga melewati batas negara.

2.4.1.3 Hubungan China—Afghanistan Setelah Konflik Afghansitan Berakhir

Hubungan China dan Afghanistan berangsur membaik setelah pemerintahan Taliban berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat di tahun 2002. China mendukung pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan dan memberikan tawaran bantuan ekonomi dan pembangunan untuk membantu membangun kembali negara tersebut pasca-perang sebesar 150 juta dolar USD untuk rekonstruksi Afghanistan (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2002). Presiden China pada saat itu, Jiang Zemin, mengatakan bahwa China menentang keras adanya terorisme dan siap bekerja sama dengan Afghanistan untuk menumpas jaringan terorisme. Namun China memilih untuk menolak berpartisipasi dalam upaya negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan memilih untuk menjaga hubungan secara langsung dengan Afghanistan dalam bentuk kesepakatan kerja sama ekonomi, seperti kerja sama dengan Kabul tahun 2008 dan kontrak pengembangan ekstraksi tembaga dari tambang Mes Aynak, Provinsi Logar sebesar 4,4 miliar USD (Marty, 2018)

China cukup berperan dalam proses perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan dalam perang Afghanistan. Sebagai negara tetangga yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, China menyadari bahwa konflik di Afghanistan berdampak pada stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut, serta dapat mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan nasional China. Pada tahun 2014, China memimpin upaya untuk mengadakan dialog antara

Taliban dan pemerintah Afghanistan. Pertemuan tersebut diadakan di kota Urumqi di wilayah Xinjiang China dan dihadiri oleh perwakilan dari Taliban, pemerintah Afghanistan, dan delegasi dari Pakistan. Hal ini menjadi implementasi politik luar negeri China yang damai. Selain itu, China juga telah memainkan peran dalam perundingan damai Afghanistan yang lebih luas, termasuk perundingan yang diadakan di Doha, Qatar pada tahun 2019 dan 2020 (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2020).

Beberapa proyek (Belt and Road Initiative) BRI di Afghanistan yang sedang dikerjakan atau direncanakan meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan jaringan listrik, dan investasi di sektor pertambangan. China juga berupaya untuk membangun kembali bandara di Kabul dan membantu mengembangkan sektor perdagangan dan investasi di negara tersebut. Namun, ada beberapa kekhawatiran bahwa proyek BRI di Afghanistan mungkin dihambat oleh ketidakpastian politik dan keamanan pasca-pengambilalihan Taliban. Selain itu, adanya tekanan internasional terhadap Taliban dapat mempengaruhi komitmen China untuk terus memberikan bantuan ekonomi dan investasi ke negara tersebut.

2.4.2 Hubungan China dengan Kelompok Taliban

Konflik Afghanistan yang pada saat itu belum menemukan titik terang hingga tahun 2021 membuat beberapa negara khawatir termasuk China, namun China sebagai *emerging power* sendiri tidak pernah terlibat langsung dalam konflik ini. Hubungan China dan Taliban pada tahun 1993 tidak seperti sekarang dimana China

pada akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Afghanistan dan dengan tegas menolak untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan pada saat itu karena pandangan China terhadap Taliban yang negatif karena hubungan Taliban dengan berbagai kelompok teroris, seperti Al-Qaeda dan juga ETIM yang mengancam perbatasan China—Afghansitan (Grossman, 2021). Hubungan China dengan Taliban berangsur membaik sejak China menyadari bahwa Taliban memiliki kekuatan politik yang penting di Afghansitan. Implementasi hubungan yang semakin baik ditunjukkan ketika para pemimpin Taliban telah berkunjung ke China sejak tahun 2014, selain itu China yang sebagai penginisiasi dialog trilateral China-Pakistan-Afghanistan, meminta kepada Taliban untuk segera bergabung dalam proses perdamaian Afghanistan (Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 2018).

Berkuasanya Taliban sebagai pemerintah baru di Afghanistan tidak dapat dihindari, setelah setelah resmi menandatangani Perjanjian Doha antara Taliban dengan Amerika Serikat pada tahun 2020, Taliban mendapat pengakuan resmi sebagai partai politik. Pasca penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 dan juga pemerintahan Afghanistan resmi jatuh ke tangan Taliban, China memberikan tawaran dan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Taliban. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dengan delegasi kelompok Taliban sekaligus pemimpin Taliban

melakukan pertemuan di Doha dan Tianjin yang membahas mengenai peningkatan hubungan antara China dengan Afghanistan.

Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi memberikan beberapa harapan dan sekaligus permintaan terhadap pemerintahan Taliban yang baru, yaitu pemerintahan Taliban diharap dapat membangun struktur politik Afghanistan yang lebih terbuka dan inklusif; menerapkan kebijakan dalam dan luar negeri yang moderat dan juga bijaksana terutama pada hak untuk anak dan juga perempuan, memutuskan hubungan dengan semua kekuatan teroris (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2021). China juga menawarkan bantuan ekonomi dan pembangunan di negara tersebut melalui inisiatif Belt and Road (BRI), apalagi dengan potensi Afghanistan sebagai wilayah strategis untuk jalur perdagangan.